

L A P O R A N

K I N E R J A

T A H U N 2 0 2 2

BIRO HUKUM

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



KATA PENGANTAR

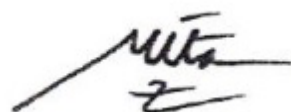
Laporan kinerja ini disusun oleh Biro Hukum sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas capaian target kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum Tahun 2022 yang dijelaskan secara ringkas. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga disusun untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pedoman Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Biro Hukum melaksanakan rencana kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana walaupun masih diperlukan upaya-upaya untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Biro Hukum sebagai bahan rekomendasi dan acuan untuk perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja Biro Hukum di masa yang akan datang, serta menjadi bagian dukungan manajemen dalam perencanaan pembangunan nasional.

Jakarta, 31 Desember 2022

Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Dasar Hukum.....	1
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.4.1 Tugas dan Fungsi.....	2
1.4.2 Struktur Organisasi.....	3
1.5 Sumber Daya Manusia.....	5
1.6 Potensi dan Permasalahan Strategis.....	6
1.6.1 Potensi/Peran Strategis.....	6
1.6.2 Permasalahan Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Rencana Strategis Kementerian.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	9
2.3 Rencana Kerja Tahun 2022.....	13
2.4 Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1 Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2022.....	16
3.1.1 Capaian Indikator Kinerja.....	17
3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja (Tahun berjalan dengan tahun lalu).....	37
3.1.3 Capaian Kinerja Lainnya.....	38
3.1.4 Realisasi Anggaran Tahun Berjalan.....	39
3.1.5 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	40
3.1.6 Analisis Efisiensi Anggaran.....	40
3.1.7 Evaluasi Internal.....	41
BAB IV PENUTUP.....	43
4.1 Kesimpulan.....	43
4.2 Tindak Lanjut.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jabatan dan Status Kepegawaian di Biro Hukum	4
Tabel 1.2	Klasifikasi Latar Belakang Pendidikan di Biro Hukum Tahun 2022	5
Tabel 2.1	IKU Sasaran Kegiatan Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024	9
Tabel 2.2	Formula Pengukuran IKU Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2022	13
Tabel 2.3	Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2022	14
Tabel 2.4	Pagu Anggaran Biro Hukum Tahun 2022	14
Tabel 3.1	Jumlah Peraturan Kebijakan	19
Tabel 3.2	Peraturan Menteri Tahun 2022 yang Diusulkan dan yang Sudah Ditetapkan	22
Tabel 3.3	Daftar Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan Selain Peraturan Menteri	25
Tabel 3.4	Jumlah Naskah Kerja Sama Tahun 2022	28
Tabel 3.5	Jumlah Naskah Kerja Sama Tahun 2021	28
Tabel 3.6	Hasil Perhitungan Pertanyaan Kunci dengan Nilai Konversi	36
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2021 dan 2022	37
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hukum dengan Renstra Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2021 dan 2022	38
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2022	39
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi kegiatan Biro Hukum Tahun 2022	40
Tabel 3.11	Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Biro Hukum tahun 2022	41
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Biro Hukum Tahun 2022	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas	4
Gambar 1.2	Komposisi SDM Biro Hukum Tahun 2022	5
Gambar 1.3	Komposisi SDM Biro Hukum Berdasarkan Umur Tahun 2022	6
Gambar 2.1	Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas	8
Gambar 2.2	Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2022 Sebelum Revisi	11
Gambar 2.3	Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2022 Sesudah Revisi	12
Gambar 3.1	Kinerja Penyusunan Permen PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022	20
Gambar 3.2	Kinerja Penyusunan Permen PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021 dan 2022 berdasarkan DRPPM	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan diamanatkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum Tahun 2022 untuk mencapai tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas. Secara garis besar, laporan kinerja Biro Hukum menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas capaian kinerja hingga realisasi anggaran berdasarkan kontrak kinerja Kepala Biro Hukum dengan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Laporan kinerja ini memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas dan Kementerian PPN/Bappenas. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Hukum diharapkan sebagai upaya peningkatan dan perbaikan kinerja yang jauh lebih baik di tahun berikutnya.

1.2. Tujuan

Tujuan Biro Hukum menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah untuk:

1. Memberikan informasi capaian target kinerja yang telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Hukum; dan
2. Meningkatkan kinerja dan perbaikan berkesinambungan bagi Biro Hukum.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2022 mengacu pada peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
8. Pedoman Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas.
9. Rencana Strategis Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2020-2024.

1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.4.1. Tugas dan Fungsi

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum, pemberian pertimbangan, pendapat, pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, advokasi dan pengoordinasian bantuan hukum, dan pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, serta pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas.

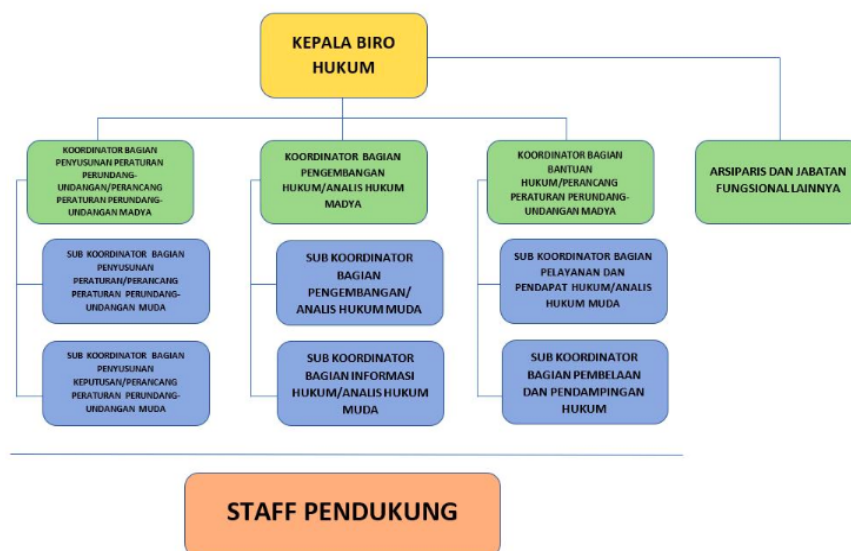
Dalam menjalankan tugas tersebut, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum;
- b. pemberian pertimbangan, pendapat, fasilitasi, pendampingan, advokasi dan bantuan hukum, penyusunan perjanjian pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, dan perjanjian kerja sama domestic dan internasional;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, dan pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Hukum.

Biro Hukum juga membantu Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas untuk melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

1.4.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Biro Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dibantu oleh 3 (tiga) Koordinator yang berfungsi sebagai Koordinator Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Koordinator Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum, dan Koordinator Bagian Bantuan Hukum. Secara struktur organisasi di lingkungan Biro Hukum dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas

Masing-masing Koordinator Bagian dibantu oleh 2 (dua) Sub Koordinator Bidang kegiatan dan dibantu oleh 1 (satu) orang Arsiparis Ahli Muda, 1 (satu) orang Staf Perencana, dan 16 orang Staf PPNPN. Sebaran jabatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

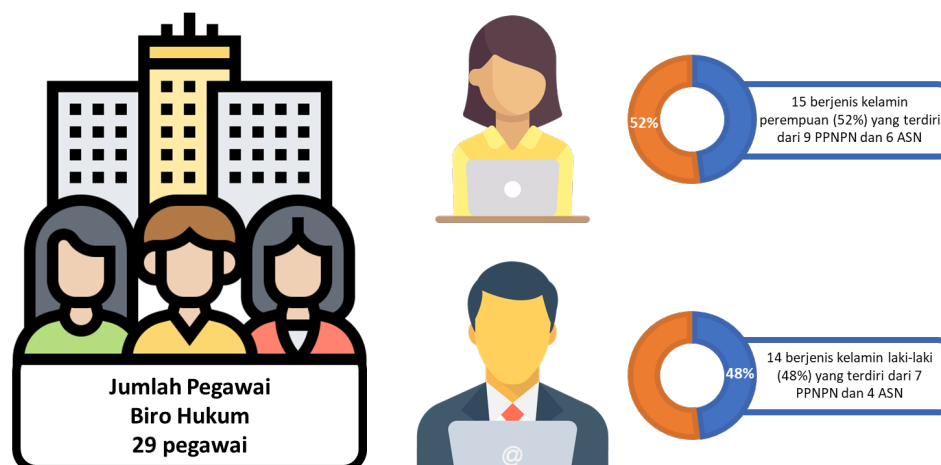
<u>Jabatan</u>	<u>ASN</u>	<u>PPNPN</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Kepala Biro</u>	1		1
<u>Koordinator</u>	3		3
<u>Sub Koordinator</u>	4		4
<u>Arsiparis Ahli Muda</u>	1		1
<u>Staf Perencana</u>	1		1
PPNPN		19	19
<u>Jumlah</u>	10	19	29

Tabel 1.1 Jabatan dan Status Kepegawaian di Biro Hukum

Tahun 2022, Biro Hukum masih kekurangan pegawai PNS, baik fungsional perancang, maupun fungsional analis hukum. Hal ini berpengaruh pada proses pencapaian kinerja sehingga beban kerja tidak sebanding dengan jumlah SDM yang tersedia. Namun, Biro Hukum mengimbangi hal tersebut dengan menambah tenaga PPNPN agar kinerja Biro Hukum tetap dapat tercapai sesuai Perjanjian Kinerja.

1.5. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dari sebuah organisasi/kelembagaan, khususnya di Kementerian PPN/Bappenas. SDM merupakan salah satu penunjang perkembangan kelembagaan. Kekuatan SDM di Biro Hukum tahun 2022 untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas dan tercapainya kinerja Biro Hukum, dapat dilihat pada Gambar 1.2.



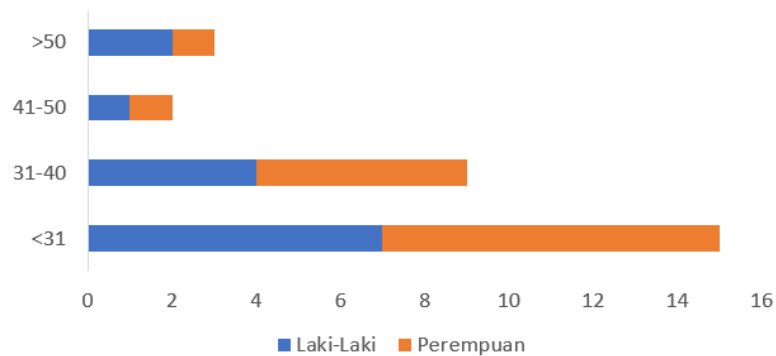
Gambar 1.2 Komposisi SDM Biro Hukum Tahun 2022

Dilihat dari Gambar 1.2 di atas bahwa pada tahun 2022, Biro Hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi memiliki total pegawai sebanyak 29 orang yang terdiri dari 10 orang pegawai dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) (34%) dan dibantu oleh 19 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) (66%). Berdasarkan Gender bahwa Biro Hukum sebanyak 14 berjenis kelamin laki-laki (48%) yang terdiri dari 7 PPNPN dan 4 ASN, terdapat 15 berjenis kelamin perempuan (52%) yang terdiri dari 9 pegawai PPNPN dan 6 ASN, dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Jabatan	Pendidikan				Status Pegawai	
	S2	S1	DIII	SMA	ASN	PPNPN
Kepala Biro	1				1	
Koordinator	3				3	
Sub Koordinator	3	1			4	
Arsiparis Ahli Muda		1			1	
Staf Perencana	1				1	
PPNPN		15	1	3		19
Jumlah	8	17	1	3	10	19

Tabel 1.2 Klasifikasi Latar Belakang Pendidikan di Biro Hukum Tahun 2022

Berdasarkan klasifikasi latar belakang pendidikan yang berada di Biro Hukum, bahwa Biro Hukum memiliki jenjang pendidikan setara SMA sampai dengan S2 diantaranya adalah 8 orang memiliki latar belakang S2 berasal dari ASN (28%), 16 orang yang memiliki latar belakang S1 yang terdiri dari 14 PPNPN dan 2 ASN (55%), 1 orang berlatar belakang DIII berasal dari PPNPN (3%) dan terdapat 4 orang berlatar belakang SMA yang berasal dari PPNPN (14%).



Gambar 1.3 Komposisi SDM Biro Hukum Berdasarkan Umur Tahun 2022


Berdasarkan rentang umur Gambar 1.2., menunjukkan bahwa sebanyak 29 pegawai yang bekerja di Biro Hukum memiliki rentang umur yang berbeda-beda. Terlihat pada grafik diatas menunjukkan bahwa umur <31 tahun lebih banyak dibandingkan dengan umur >50 tahun. Sebanyak 8 pegawai perempuan dan 7 pegawai laki-laki. Hal ini membuktikan kinerja Biro Hukum ini didominasi pegawai muda dengan semangat kerja berjiwa muda dan diharapkan terdapat lebih banyak inovasi kinerja dari pegawai muda ini.

1.6. Potensi dan Permasalahan Strategis

1.6.1. Potensi/Peran Strategis

Peran strategis yang dilaksanakan oleh Biro Hukum pada tahun 2022 diantaranya sebagai berikut:

1. Mengawal penyusunan regulasi, peraturan dan kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas baik peraturan yang di prakarsai oleh Kementerian PPN/Bappenas maupun peraturan yang dimana Kementerian PPN/Bappenas terlibat dalam pembahasan secara substansi. Peraturan tersebut meliputi UU, PP, Perpres, Perda, Keppres, Inpres sampai peraturan dan kebijakan yang berlaku baik

- 
- eksternal maupun internal meliputi Peraturan Menteri, Petunjuk Pelaksanaan, Pedoman, Surat Edaran, Keputusan.
2. Berperan sebagai *in house lawyer* apabila Kementerian PPN/Bappenas dihadapkan pada permasalahan dan kasus baik litigasi maupun non litigasi.
 3. Ikut dilibatkan dalam semua permasalahan dan potensi akan adanya permasalahan terkait dengan pegawai serta hal-hal teknis misalnya permasalahan pengadaan, hibah, serta konsultasi-konsultasi hukum untuk pegawai.
 4. Mengawal penyusunan naskah kerjasama yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas baik dengan Kementerian/Lembaga lainnya maupun dengan Mitra Pembangunan, Universitas, dan Swasta.
 5. Memegang peranan dalam Agenda Reformasi Birokrasi untuk area perubahan penataan peraturan perundang-undangan.

1.6.2. Permasalahan Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2022, Biro Hukum masih mengalami beberapa kendala diantaranya sebagai berikut:

1. Keterbatasan PNS menjadi kendala utama dari Biro Hukum. Penambahan PNS yang diterima Biro Hukum terakhir di tahun 2015. Kekurangan SDM ini diakali dengan penambahan PPNPN namun dengan status yang bukan pegawai tetap, PPNPN ini terkadang berganti di tiap tahun anggaran baru sehingga menyebabkan kinerja di Biro Hukum menjadi sedikit terganggu karena pergantian staf dan memerlukan pembelajaran baru untuk staf PPNPN yang baru.
2. Penyusunan peraturan eksternal yang merupakan prakarsa Kementerian PPN/Bappenas terkadang kurang berjalan dengan lancar dan tidak memenuhi target penyusunan B03, B06, B09, dan B12.
3. Perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan internal, baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas maupun dengan eksternal (Kementerian/Lembaga/Mitra kerja/Universitas/Pemda dll).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum Tahun 2020-2024 mengacu pada Renstra Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas) Tahun 2020-2024. Sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan, dan target tiap tahunnya telah diatur di dalam Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas tersebut.

Rencana Strategis pada hakikatnya merupakan penjabaran dari bagaimana upaya tercapainya visi dan misi organisasi. Visi Misi Biro Hukum mengikuti Visi Misi Kementerian PPN/Bappenas yang tertuang dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 2.1 Visi dan Misi Kementerian PPN/Bappenas

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan dan sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia, dengan indikator tujuan: tingkat perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Dengan Sasaran Strategis (SS):

- SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
- SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

2. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan indikator tujuan: tingkat daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan Sasaran Strategis (SS):

- SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
3. 3. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien, dengan indikator tujuan: tingkat tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Dengan Sasaran Strategis (SS):

- SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Visi-Misi, Tujuan dan Sasaran Setmen PPN/Settama Bappenas mengikuti level Kementerian.


Begitu juga halnya dengan di level Biro Hukum. Dari ketiga tujuan tersebut hanya tujuan ketiga saja yang mendukung dan sesuai tugas dan fungsi Biro Hukum yang diwujudkan dalam 3 (tiga) Indikator Sasaran Kegiatan. Berikut Tabel 2.1. Renstra Biro Hukum yang tercantum di Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas 2020-2024.

Sasaran Kegiatan/Output	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
• Layanan Penyusunan Produk Hukum • Layanan Bantuan Hukum	IKSK-1: % penyelesaian penyusunan peraturan perundangundangan dan produk hukum	100%	100%	100%	100%	100%
	IKSK-2: % pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%
Layanan Pengembangan dan Informasi Hukum	IKSK-3: Tingkat Kepuasan Layanan Bidang Hukum	86	88	90	92	94

Tabel 2.1. IKU Sasaran Kegiatan Rencana Strategis Biro Hukum Tahun 2020-2024

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen pimpinan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2022 dilaksanakan merujuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun



2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Perjanjian kinerja Biro Hukum sebelum perubahan dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Perjanjian kinerja Biro Hukum tahun 2022 mengalami 1 (satu) kali revisi, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum pada Januari 2022 kemudian dilakukan revisi pada November 2022. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan target kinerja Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur *Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:*

- a. *Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;*
- b. *Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan*
- c. *Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.*

Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum Tahun 2022 setelah revisi inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum tahun 2022 (lihat Gambar 2.3).


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO HUKUM

Sasaran Program:
Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

NO	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Indikator SS 4.1: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas		
1	Layanan Pembinaan dan Pelayanan Hukum	% penyelesaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan. % pelayanan terhadap permintaan pendampingan	96% 96%

Kegiatan: Pembinaan dan Pelayanan Hukum Anggaran: Rp 4.400.000.000,00

Atasan Pimpinan Unit Kerja Jakarta, Januari 2022
Pimpinan Unit Kerja



Himawan Hariyoga Djojokusumo



Raden Rara Rita Erawati

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2022 Sebelum Revisi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO HUKUM

Sasaran Strategis/Program:

4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM

NO	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Sasaran Strategis/Program 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM		
	Indikator SS 4.1: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas		
1	Layanan Hukum	% penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum.	100%
2	Layanan Bantuan Hukum	% pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum	100%
II.	Sasaran Strategis/Program 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM		
	Indikator SS 4.2: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan		
1	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Hukum • Layanan Bantuan Hukum 	Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum	90

Kegiatan:
Pembinaan dan Pelayanan Hukum

Anggaran:
Rp 4,547,524,000,00

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Jakarta, November 2022
Pimpinan Unit Kerja


Taufik Hanafi


Raden Rara Rita Erawati

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2022 Sesudah Revisi

Untuk mengetahui capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum tahun 2022, maka diukur melalui formula pengukuran masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Pengukuran capaian IKU 2022 menggunakan metode yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Formula pengukuran IKU 2022 lebih disempurnakan sehingga akan lebih mencerminkan pengukuran capaian IKU yang SMART. Formula pengukuran capaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Sasaran Kegiatan/ Output	Tujuan	Formula
Layanan Penyusunan Produk Hukum	Mengukur jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	$\frac{\text{Jumlah Peraturan perundang-undangan yang telah difasilitasi}}{\text{Jumlah permintaan penyusunan peraturan perundang-undangan}} \times 100\%$
Layanan Bantuan Hukum	Mengukur jumlah pelayanan pendampingan dan bantuan hukum yang dihadapi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan atau Pegawai Kementerian PPN/Bappenas.	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan pendampingan hukum}}{\text{Jumlah permintaan pendampingan hukum}} \times 100\%$
Layanan Pengembangan dan Informasi Hukum	Mengukur kualitas kinerja pelayanan bidang hukum bagi seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas	Komposit berdasarkan laporan hasil survei kepuasan pemangku kepentingan di Bidang Hukum

Tabel 2.2 Formula Pengukuran IKU Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja
Biro Hukum Tahun 2022

Dari beberapa sumber tentang pentingnya pengukuran kinerja dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan organisasi di masa yang akan datang.

2.3. Rencana Kerja Tahun 2022

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 merupakan penjabaran dari sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Hukum yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2020-2024. Di dalam RKT ditetapkan aksi berupa rincian kegiatan untuk mendukung ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Hukum. Selanjutnya koordinator dan staf dapat bekerja secara sistematis sesuai dengan tuisi dan IKU Biro Hukum. Rencana Kerja Tahun 2022 Biro Hukum dapat dilihat pada Tabel 2.3.

IKU Eselon I	IKU Eselon II	Rincian Kegiatan	
Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas	Kinerja Biro Hukum	Kinerja Koordinator dan Staf	
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum	Pemberian Layanan Fasilitasi Penyusunan Peraturan	Penyusunan Peraturan Tingkat I dan II
			Penyusunan Peraturan Tingkat III
			Penyusunan Peraturan Tingkat III/Kebijakan
			Koordinasi Penyusunan Keputusan
			Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Hukum
	Persentase Terhadap Permintaan Pendampingan dan Bantuan Hukum	Pemberian Layanan Pengembangan dan Informasi Hukum	Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi Hukum
			Pelaksanaan Tugas Lainnya/Dukungan Manajemen Bidang Pengembangan dan Informasi Hukum
			Pemberian Pertimbangan, Telaahan, dan Pendapat Hukum
			Pemberian Fasilitasi, Pendampingan, dan Bantuan Hukum Litigasi dan/atau Non-Litigasi
			Pemberian Pertimbangan, Nasihat, Konsultasi, dan Penyusunan Naskah Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan	Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum	Kepuasan Stakeholder Internal terhadap Layanan Hukum	Survei Layanan Hukum
			Pemberian Pertimbangan, Nasihat, Konsultasi, dan Pendampingan Penyusunan Naskah Kerja Sama Internasional


Tabel 2.3. Rencana Kerja Biro Hukum Tahun 2022

2.4. Alokasi Anggaran Tahun 2022

Alokasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2021 sebesar 4.400.000.000 dan dilakukan penghematan anggaran sehingga di Tahun 2021 anggaran Biro Hukum menjadi 4.224.000.000. Di tengah tahun 2022, terdapat permintaan penambahan anggaran sebesar 436.949.000. Adapun rincian perubahan alokasi anggaran Biro Hukum tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.4.

Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Setelah Blokir
Kegiatan Penguatan Kapasitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas	1.600.000.000	1.536.000.000
Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Kepatuhan Terhadap Regulasi	1.300.000.000	1.248.000.000
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan, Pertimbangan dan Bantuan Hukum	1.500.000.000	1.440.000.000
TOTAL	4.400.000.000	4.224.000.000
Penambahan		436.949.000
TOTAL		4.660.949.000

Tabel 2.4 Pagu Anggaran Biro Hukum Tahun 2022



Berdasarkan Tabel 2.4 menunjukkan bahwa pagu anggaran Biro Hukum TA 2022 mengalami pemblokiran sebesar 176.000.000 diakibatkan kebijakan pemerintah untuk melakukan refocusing dan realokasi pagu belanja kementerian. Hal ini berdampak pada kualitas realisasi Kinerja di Biro Hukum, namun di trimester ke-4 terdapat penambahan pagu anggaran untuk Biro Hukum sehingga keseluruhan capaian kinerja Biro Hukum diharapkan dapat memenuhi target kinerja yang diharapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Organisasi Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja merupakan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama. Dalam pembuatan laporan kinerja didalamnya terdapat pengukuran, evaluasi, dan analisa kinerja. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Sasaran. Selanjutnya pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai suatu keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra.

Capaian kinerja organisasi memiliki sasaran strategis. Adapun sasaran strategis tersebut dapat dilakukan sebagai berikut: a) membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, b) membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, c) membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, d) membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar, e) analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusi yang diberikan, f) analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, g) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja), h) realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

A. IKSK - 1: Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum



Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-1 yaitu “Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum” Tahun 2022 telah berhasil tercapai 100%. Hal ini didapat dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang difasilitasi dibagi dengan jumlah permintaan

fasilitasi peraturan perundang-undangan, kemudian dikali 100%.

Dalam kegiatan ini, beberapa hal yang telah dilakukan adalah:

a. Fasilitasi terhadap Penyusunan Keputusan

Selama tahun 2022, Biro Hukum memfasilitasi penyusunan sebanyak 148 Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan 109 Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Selain menyusun Keputusan sebagaimana disebut di atas, Biro Hukum juga memfasilitasi penyusunan Keputusan Pejabat Eselon I yang lain seperti Keputusan Deputy, Keputusan Inspektur Utama, dan Keputusan PPK.

Dalam praktek penyusunan Keputusan Pejabat Eselon I, banyak unit kerja dan satker pengusul yang meminta koreksi terhadap konsep keputusan, namun tidak menyampaikan *copy* salinan keputusan kepada Biro Hukum. Dalam mengatasi kendala ini, Biro Hukum, melalui nota dinas penyampaian hasil koreksi SK, telah menyampaikan kepada unit kerja untuk mengirimkan *copy* salinan dari keputusan yang telah ditetapkan agar dapat didokumentasikan. Follow up kepada unit kerja dan satker pengusul juga terus dilakukan, namun banyaknya jumlah unit kerja dan satker pengusul yang perlu di-*follow* up terus menerus karena tidak kunjung menyampaikan *copy* salinan keputusan kepada Biro Hukum menjadi hambatan tersendiri. Akibatnya, dokumentasi untuk Keputusan Pejabat Eselon I tidak selengkap dokumentasi Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Keputusan

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Data Keputusan Pejabat Eselon I yang telah didokumentasikan adalah Keputusan Deputi dan Keputusan Irtama yang telah direviu dan setelah ditetapkan kemudian dilaporkan kepada Biro Hukum dengan menyampaikan *copy* salinan keputusannya.

- b. Fasilitas terhadap penyusunan peraturan kebijakan di bawah Peraturan Menteri

Pada tahun 2022, Biro Hukum memfasilitasi penyusunan 4 (empat) Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Menteri, 7 (tujuh) Pedoman Sekretaris Menteri, 4 (empat) Surat Edaran Menteri, dan 6 (enam) Surat Edaran Sekretaris Menteri.

No.	JUDUL PERATURAN KEBIJAKAN
Pedoman Pelaksanaan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas	
1.	1/JUKLAK/SESMEN/04/2022 tentang Penggunaan Dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022
2.	2/JUKLAK/SESMEN/03/2022 Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja
3.	3/JUKLAK/SESMEN/03/2022 tentang Perubahan Atas Juklak Sesmen Nomor 2/JUKLAK/SESMEN/06/2022 tentang Standar dan Penyediaan Fasilitas Kerja di Kementerian PPN/Bappenas
4.	4/JUKLAK/SESMEN/11/2022 tentang Tata Cara Integrasi Portal Satu Data Indonesia
Pedoman Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas	
1.	1 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
2.	2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Perencana
3.	3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Intra Kementerian PPN/Bappenas
4.	4 Tahun 2022 tentang Manajemen Pengetahuan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas
5.	5 Tahun 2022 tentang Manajemen Layanan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas
6.	6 Tahun 2022 tentang Layanan Pusat Data Kementerian PPN/Bappenas
7.	7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian PPN/Bappenas

Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas	
1.	1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
2.	2 Tahun 2022 tentang Tunjangan Hari Raya
3.	3 Tahun 2022 tentang Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Pendidikan
4.	4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Usulan Aspirasi DPR untuk DAK Fisik di Kementerian PPN/Bappenas
Surat Edaran Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas	
1.	1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas Nomor 1 Tahun 2023 tentang Administrasi Kegiatan dan Anggaran dalam Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru yang Mendukung Produktivitas Kerja serta Memprioritaskan Kesehatan dan Keselamatan Pegawai
2.	2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3.	3 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana
4.	4 Tahun 2022 tentang Penerapan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana
5.	5 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian PPN/Bappenas
6.	6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana

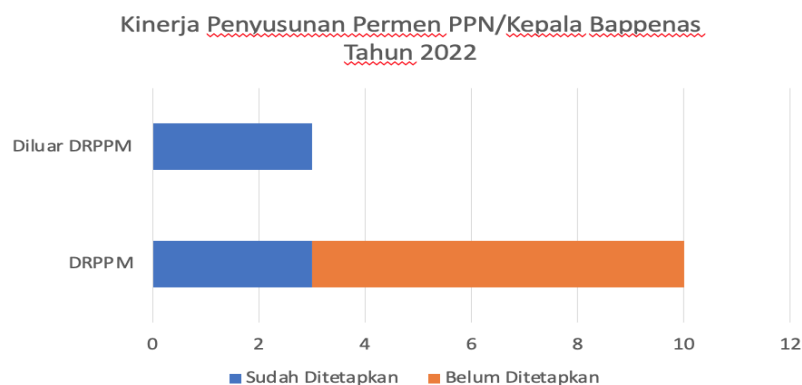
Tabel 3.1 Jumlah Peraturan Kebijakan

- c. Fasilitasi terhadap penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pada awal tahun anggaran, Kementerian PPN/Bappenas, dikoordinasi oleh Biro Hukum menyusun rencana penyusunan Peraturan Menteri. Rencana penyusunan Peraturan Menteri digunakan sebagai acuan atas Peraturan Menteri apa saja yang akan disusun pada tahun anggaran tersebut. Setiap unit kerja akan menyampaikan daftar usulan rancangan Peraturan Menteri dengan menyertakan urgensi penyusunannya. Adapun dalam pelaksanaannya, Biro Hukum bertugas memfasilitasi kebutuhan penyusunan Peraturan Menteri dari masing-masing unit kerja. Setiap unit kerja pengusul akan menyampaikan draft Rancangan Peraturan Menteri yang akan dibahas bersama dengan Biro Hukum.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan di Kementerian PPN/Bappenas dimana Peraturan Menteri ini, menyebutkan bahwa perlu disusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam sebuah Keputusan Menteri. Oleh sebab itu Biro Hukum meminta semua unit kerja di bawah Kementerian PPN/Bappenas untuk mengusulkan Peraturan Menteri yang akan disusun di tahun 2022.

Di awal tahun 2022, Biro Hukum telah menyusun Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri tersebut, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.18/M.PPN/HK/02/2022 tentang Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022. Dalam keputusan tersebut menetapkan 10 (sepuluh) usulan rancangan Peraturan Menteri yang akan dilakukan penyusunan pada tahun 2022.

Sampai dengan akhir tahun 2022 telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, dimana terdapat 3 (tiga) Peraturan Menteri/Kepala Bappenas yang merupakan Peraturan Menteri yang bukan berasal dari Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Tahun 2022.



Gambar 3.1 Kinerja Penyusunan Permen PPN/Kepala Bappenas Tahun 2022

Berikut ini merupakan Peraturan Menteri yang diusulkan pada tahun 2022 dan masuk dalam DRPPM Tahun 2022, yaitu:

No.	Judul Peraturan Menteri	Progres sampai Akhir Tahun 2022
1.	<p>Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.</p> <p>Ditetapkan dengan Permen PPN/Ka. Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.</p>	Telah Selesai
2.	<p>Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat <i>Millennium Challenge Account</i>-Indonesia pada Program Hibah Compact 2.</p> <p>Ditetapkan dengan Permen PPN/Ka. Bappenas Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat <i>Millennium Challenge Account</i> Indonesia II.</p>	Telah Selesai
3.	<p>Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Perencana</p>	Diskusi Awal
4.	<p>Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Penyusunan Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana</p>	Diskusi Awal
5.	<p>Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana</p>	Diskusi Awal
6.	<p>Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pengelolaan Barang Milik Negara</p>	Tahap Finalisasi
7.	<p>Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</p>	Diskusi Awal
8.	<p>Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dikhususkan untuk Ibu Kota Negara.</p> <p>Ditetapkan dengan Permen PPN/Ka. Bappenas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kerja Sama</p>	Telah Selesai

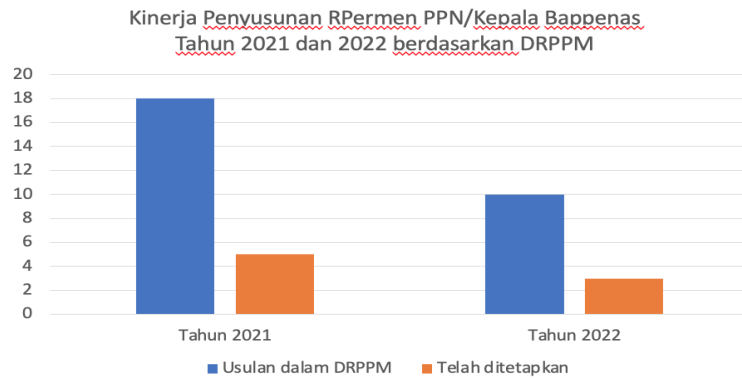
No.	Judul Peraturan Menteri	Progres sampai Akhir Tahun 2022
	Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dikhususkan untuk Ibu Kota Negara.	
9.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	Tahap Selesai Harmonisasi
10.	Rancangan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah	Diskusi Awal

Tabel 3.2 Peraturan Menteri Tahun 2022 yang Diusulkan dan yang Sudah Ditetapkan

Kinerja Biro Hukum dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Tahun 2022 masih belum maksimal dan menemukan beberapa kendala. Terdapat beberapa Rancangan Peraturan Menteri yang masih dalam pembahasan, harmonisasi, dan menunggu penetapan. Kesiapan substansi dari masing-masing unit kerja pengusul sangat berpengaruh pada penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri yang diusulkan. Selain itu, penyesuaian jadwal pembahasan antara Biro Hukum, unit kerja pengusul, serta narasumber atau *stakeholder* lainnya menjadi kendala dalam proses penyelesaian.

Kendala sebagaimana disebutkan di atas juga ditemukan pada penyusunan tahun 2021. Upaya koordinasi dan penjadwalan ulang rapat-rapat pembahasan selalu dilakukan agar penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri yang telah diusulkan dapat lebih cepat selesai.

Terkait Rancangan Peraturan Menteri yang belum selesai hingga tahun anggaran selesai, akan diusulkan kembali dalam usulan tahun anggaran berikutnya dan menjadi prioritas untuk diselesaikan secepatnya.



Gambar 3.2 Kinerja Penyusunan Permen PPN/Kepala Bappenas Tahun 2021 dan 2022 berdasarkan DRPPM

- d. Fasilitas terhadap penyusunan Peraturan Perundang-Undangan lainnya
- Sampai dengan akhir tahun 2022, terdapat pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan selain Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas yaitu Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Presiden.
- Sebanyak 4 (empat) Rancangan Undang-Undang, 1 (satu) Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 24 (dua puluh) Rancangan Peraturan Presiden dengan rincian sebagai berikut:

No.	JUDUL PERATURAN
Rancangan Undang-Undang	
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Ibu Kota Negara
2.	Rancangan Undang-Undang tentang RPJPN
3.	Rancangan Undang-Undang tentang SPPN
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perkotaan
Rancangan Peraturan Pemerintah	
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
Rancangan Peraturan Presiden	
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan

No.	JUDUL PERATURAN
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Korporasi Petani dan Nelayan
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah 2023
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2023
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2021-2024
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
10.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultasi Nasional
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
12.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja
13.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Industri Digital 2023-2045
14.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Manajemen Talenta
15.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Transformasi Bali
16.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kedirgantaraan
17.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Transportasi Perkotaan
18.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Asuransi Pertanian
19.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Transformasi Ekonomi
20.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara
21.	Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Negara
22.	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara
23.	Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024

No.	JUDUL PERATURAN
24	Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara

Tabel 3.3 Daftar Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan Selain Peraturan Menteri

e. Fasilitasi penyusunan Undang-Undang yang merupakan prakarsa dari Kementerian PPN/Bappenas

a) UU IKN dan RUU Perubahan UU IKN

Dalam rangka percepatan proses persiapan, pembangunan, pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Bapak Presiden memberikan arahan untuk dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditetapkan ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023 sebagai RUU inisiatif pemerintah, dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas sebagai Penanggung Jawab dan pengusul. Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas sebagai unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyusunan peraturan dan produk hukum mengawal penyusunan RUU IKN bersama dengan unit kerja lain. Dalam hal pengajuan rancangan RUU Perubahan UU IKN, Biro Hukum berkoordinasi dengan unit kerja Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan, dan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) yang meminta Bappenas untuk menjadi instansi pemrakarsa atas RUU Perubahan UU IKN berdasarkan Surat Kepala OIKN nomor B.064/Kepala/Otorita IKN/IX/2022, bersama-sama mengajukan permohonan Pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 September 2022 dengan Nomor B. 781/M.PPN/SES/HK.02.03/09/2022. Serta dalam perkembangannya, telah dilaksanakan pula beberapa kali Konsultasi Publik dan *Focus Group Discussion*.

b) Peraturan Presiden yang masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2022

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2022, Kementerian PPN/Bappenas telah mendapatkan persetujuan untuk menyusun 3 (tiga) Peraturan Presiden, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultasi Nasional
3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial sampai dengan Desember 2022 sedang dalam proses harmonisasi. Hambatan yang ditemukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial adalah masih ada catatan terkait dengan substansi Rancangan Peraturan Presiden yang memerlukan arahan dan pembahasan di tingkat Menteri. Menindaklanjuti hal tersebut, terdapat arahan Presiden bahwa pengaturan mengenai salah satu strategi dalam Rancangan Peraturan Presiden, yaitu Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), perlu dikoordinasikan kembali dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang ditugaskan untuk mengkonsolidasikan persiapan pelaksanaan Regsosek. Terkait hal tersebut, pengaturan Regsosek kemungkinan akan menjadi Rancangan Peraturan Presiden terpisah. Adapun pengaturan mengenai strategi lainnya tetap diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial sebagaimana ditetapkan dalam Keppres 23/2021. Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah pemisahan substansi terkait Regsosek menjadi Rancangan Peraturan Presiden tersendiri melalui koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan penyesuaian draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Reformasi Sistem Perlindungan Sosial memuat pengaturan tentang strategi-strategi

lainnya (Perlindungan Sosial Adaptif, Inovasi Skema Pendanaan, Penyaluran Bantuan secara Non Tunai, dan Integrasi Perlindungan Sosial).

Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultasi Nasional sampai dengan Desember 2022 sedang dalam proses harmonisasi. Hambatan yang ditemukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultasi Nasional adalah Kementerian/Lembaga kurang responsif untuk memberikan paraf pada Berita Acara Penyelesaian Rapat PAK Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultasi Nasional sehingga jadwal harmonisasi menjadi mundur dari timeline yang seharusnya.

Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sampai dengan Desember 2022 sedang dalam proses pembahasan PAK. Hambatan yang ditemukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender adalah permohonan paraf hasil (kesepakatan) PAK kepada seluruh PAK tidak direspon dengan cepat dan masukan yang diterima dari K/L melampaui batas waktu yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan adalah menghubungi satu-satu seluruh kementerian lembaga PAK untuk memberikan paraf atas Berita Acara Penyelesaian Rapat PAK secara digital melalui link paraf dan mengingatkan kembali dengan menghubungi masing-masing K/L sebanyak dua kali. Selain itu juga memperpanjang waktu pengiriman masukan/ tanggapan kepada Biro Hukum.

- c) Peraturan Presiden yang merupakan luncuran dari Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun sebelumnya

Adapun Rancangan Peraturan Presiden yang merupakan prakarsa Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021 yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan dan

Pemanfaatan Jamu sedang dalam tahapan permohonan paraf K/L untuk dapat ditetapkan oleh Presiden.

B. IKSK - 2: Pelayanan Terhadap Permintaan Pendampingan dan Bantuan Hukum



Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-2 yaitu “Persentase Pelayanan terhadap Permintaan Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum” Tahun 2022 telah berhasil tercapai 100%. Hal ini didapat dari perhitungan jumlah pelaksanaan pendampingan hukum dibagi dengan jumlah permintaan

pendampingan hukum, kemudian dikali 100%.

Dalam kegiatan ini beberapa hal yang dilakukan adalah:

a. Fasilitasi penyusunan Naskah Kerja Sama

Naskah Kerja Sama Umum		Naskah Kerja Sama Teknis	
Telah Ditandatangani	Belum Ditandatangani	Telah Ditandatangani	Belum Ditandatangani
27	14	6	12

Tabel 3.4 Jumlah Naskah Kerja Sama Tahun 2022

Naskah Kerja Sama Umum		Naskah Kerja Sama Teknis	
Telah Ditandatangani	Belum Ditandatangani	Telah Ditandatangani	Belum Ditandatangani
30	18	22	6

Tabel 3.5 Jumlah Naskah Kerja Sama Tahun 2021

Tabel di atas merupakan jumlah Naskah Kerja Sama Umum dan Naskah Kerja Sama Teknis yang telah ditandatangani dan yang belum ditandatangani yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan pihak lain, seperti Institusi Pemerintah, Lembaga, serta Mitra Pembangunan dari Luar Negeri. Dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 bahwa Biro Hukum berhasil memfasilitasi masing-masing pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 30 dan 41 NKS Umum serta 28 dan 18 NKS Teknis.

Meskipun demikian, masih terdapat NKS Umum dan NKS Teknis yang belum ditandatangani pada masing-masing akhir tahun anggaran. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa NKS yang masih tahap pembahasan dan menunggu untuk ditandatangani.

Sesuai tugas dan fungsi Biro Hukum dalam pendampingan dan penyusunan Naskah Kerja Sama Bersama dengan Unit Kerja terkait. Dalam proses penyusunan Naskah Kerja Sama Kementerian PPN/Bappenas yang dimana telah memiliki dasar sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan kerja sama berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas pada tahun kedua pelaksanaannya dianggap telah mampu meningkatkan tingkat kedisiplinan Unit Kerja dalam proses penyusunan dan pengadministrasian Naskah Kerja Sama.

Pada tahun 2022 sebagaimana kondisi saat ini yang masih dalam transisi pandemi COVID 19 yang menjadikan beberapa proses belum dapat berjalan dengan normal dan menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan kerja sama. Meskipun demikian, Biro Hukum secara aktif membantu proses penyusunan Naskah Kerja Sama baik memfasilitasi untuk rapat secara daring dan luring demi melangsungkan proses pembahasan terhadap kerja sama yang lebih efektif. Dari jumlah kerja sama yang dilakukan dengan mitra pada tahun 2022, adapun kendala lainnya menitik beratkan pada sejumlah pembahasan yang masih bergulir baik dengan mitra maupun unit kerja sehingga masih memerlukan waktu untuk proses finalisasi hingga penandatanganan.

- b. Fasilitasi pemberian pendapat hukum terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja. Di tahun 2022, Biro Hukum tercatat kali memberikan konsultasi, yaitu:
 - Permohonan Klarifikasi Seleksi Calon Kepala LKPP kepada Panitia Seleksi Calon Kepala LKPP
 - Permohonan Pindah PNS Bappeda Kota Tual ke Kementerian PPN/Bappenas
 - Permohonan Penanganan Penggantian Kerugian Negara
 - Pemindahan BMN Tanah di Jatisari dan Jatisampurna
 - Pendampingan Rencana Pembiayaan Belanja Keperluan Perkantoran

- Koordinasi Pengadaan Sewa Kendaraan pada Development Ministerial Meeting G20
- Tindak Lanjut Pengunduran diri Pemenang nomor urut 1 Tender cepat pengadaan Alat Komunikasi dan Pengadaan Meubelair Ruang Kerja Menteri
- Pemindahan Fasos Fasum Kementerian PPN/Bappenas ke Pemerintah Kota Depok
- Penggunaan Logo Kementerian PPN/Bappenas oleh Koperasi Pegawai Bappenas
- Rencana Pengadaan PFM MDTF III
- Pembahasan Usulan Revisi Juklak Standar Fasilitas Kerja Kementerian PPN/Bappenas
- Pembahasan Sayembara Logo Kementerian PPN/Bappenas
- Pengadaan Fasilitas Kesehatan berupa General Check Up bagi pegawai Kementerian PPN/Bappenas
- Pembahasan Usulan Mekanisme Pengadaan Konsultan CDF
- Pemeriksaan BMN Kementerian PPN/Bappenas di Gudang Komplek Bappenas Jatisampurna, di Siaga Krobokan dan di Grogol
- Evaluasi Pelaksanaan Penyedia EO Development Working Group G20 2022
- Permohonan Dokumen untuk Bukti Dukung NSPK Manajemen ASN

Adapun untuk permohonan konsultasi yang diterima oleh Biro Hukum pada tahun 2022 adalah sebanyak 19 antara lain konsultasi terkait dengan internal Kementerian PPN/Bappenas dan juga berbagai bentuk kerja sama yang akan dilakukan dengan mitra kerja sama. Hal-hal diajukan berupa konsultasi terkait pendapat hukum maupun langkah hukum yang dapat diambil sehubungan dengan kasus yang sedang dihadapi baik dalam ranah Institusi yaitu Kementerian PPN/Bappenas maupun yang berkaitan dengan pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Beberapa hal kemudian dimohonkan secara tertulis melalui Nota Dinas yang kemudian dimintakan telaah secara formil kepada Biro Hukum, dan ada pula yang yang meminta pendapat melalui rapat langsung dengan mengundang Biro Hukum sebagai unit kerja yang mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang langsung berkaitan dengan permasalahan tersebut. Mengingat kondisi

saat ini yang masih dalam masa transisi Pandemi Covid- 19, maka sebagian unit kerja meminta konsultasi kepada Biro Hukum melalui rapat daring (online) maupun menghubungi via telekomunikasi kepada staf Biro Hukum mengenai hal-hal tersebut.

Kendala yang dihadapi Biro Hukum saat ini dalam menangani proses konsultasi antara lain yaitu jumlah sumber daya manusia yang sangat terbatas untuk melayani sejumlah permintaan konsultasi kepada Unit Kerja dilingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Dengan kata lain, hambatan yang dirasakan dan juga adanya dampak pada waktu penyampaian hasil konsultasi juga dalam hal mengikuti berbagai kegiatan yang mengharuskan kehadiran secara langsung dalam proses pelayanan terhadap unit kerja.

Dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah permintaan konsultasi kepada Biro Hukum tahun 2022 meningkat sebanyak 8 permintaan yang kemudian dilakukan penelaahan lebih lanjut dan disampaikan kembali kepada Unit Kerja untuk dilakukan penjelasan.

Di tahun 2022, Biro Hukum tercatat 33 kali menyampaikan telaah/pendapat hukum, yaitu:

- Telaah Kontrak untuk SDI meliputi kontrak untuk PPNPN, penyusunan, modul platform SDI Tahun I, kontrak pengadaan jasa lainnya, penyelenggaraan webinar, penyusunan pedoman Tata Laksana Penetapan dan Pembatasan Akses SDI, serta Telaah Kontrak Modul Layanan SDI Tahap 1, telaahan kontrak launching SDI
- Tindak Lanjut Data Tuntutan Hukum Penanganan Pengungsi Kerusuhan Maluku
- Telaah Draft Kontrak Jasa EO/PCO Penyelenggaraan Rangkaian G20 Development Working Group Presidensi Indonesia
- Telaah Kontrak Tenaga Ahli/Jasa Konsultasi PPK PPN VIII
- Telaah Draft Konsep Berita Acara Serah Terima Layanan Persuratan, Ekspedisi, dan Penggandaan
- Kegiatan Webinar SDI
- Telaah Kontrak Jasa Konstruksi Lantai Dasar dan Mezzanine Gedung Wisma Bakrie 2
- Telaah Kontrak Modul Data Analitik
- Telaah Kontrak Change Request II

- Telaah Rencana Penarikan PNS Bappenas yang bertugas di Instansi Lain
- Telaah Konsep Surat Perjanjian Tugas Belajar PNS Bappenas
- Penyampaian Telaah Konsep Kontrak Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan TA 2022
- Penyampaian Masukan dan Notulensi Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendirian dan Pengelolaan Institute of Innovative Farming Systems (IIFS) Manado
- Permohonan Tanggapan/Masukan terhadap Draf Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT. Pos Indonesia (Persero)
- Penyampaian Masukan Draf Addendum Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian PPN/Bappenas dan Lembaga Penyiaran Publik RRI
- Penyampaian Masukan terhadap Draf Grant Implementation Agreement (GIA) PCGI USAID
- Penyampaian Telaah Kegiatan Knowledge Partnership Platform (KPP) Australia –Indonesia
- Penyampaian Draf Final Perjanjian Kerja Sama Operasional (PKSO) Program Pelatihan Swakelola Tipe II Pusbindiklatren Tahun Anggaran (T.A) 2022
- Penyampaian Telaah Hukum Konsep Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian PPN/Bappenas dan Griffith University
- Penyampaian Masukan Terhadap Dokumen Project Concept Paper (PCP) Development of K-Smart Logistics Pilot Center and Human Resource Training Program for the E-Commerce Logistics Innovation in Indonesia
- Penyampaian Reviu terhadap Konsep Grant Agreement AFD
- Telaah Hukum dan Masukan atas Rancangan Naskah Perjanjian Hibah Global Environment Facility (GEF) Indonesia Sustainable Cities Project (SCIP)
- Penyampaian Telaah terhadap Draft Nota Kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dan PT Bumi Indah Prima
- Penyampaian Telaah Hukum Financing Agreement AFD Support for the Integration of Blue Carbon Ecosystems in Indonesia's Biodiversity and Climate Policies
- Penyampaian Telaah Hukum Perjanjian Kerja Sama antara Bappenas dan MaPPI FHUI tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan

Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum serta Indeks Akses terhadap Keadilan Tahun 2021

- Penyampaian Telaah atas Rancangan Draf MoU dengan Ministry National Development (MND) Singapura
- Penyampaian Telaah atas Rancangan Draf MoU dengan Ministry National Development (MND) Singapura
- Penyampaian Masukan dengan Draf Nota Kesepahaman/MoU dengan Asosiasi Bisnis Koperasi Nasional/NCBA

Dalam penyampaian telaah yang dilakukan oleh Biro Hukum terkait hal-hal yang dimohonkan oleh Unit Kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas terkait aspek-aspek hukum yang terdapat didalam proses suatu proyek maupun kerja sama yang akan dilakukan Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2022 ini berjumlah 33 permintaan dengan masing-masing memiliki detail dan permasalahan yang kemudian diberikan telaah dan riviui oleh Biro Hukum. Dibandingkan dengan tahun 2021 jumlah permintaan terhadap telaah hukum yang diterima oleh Biro Hukum mengalami kenaikan jumlah yang cukup signifikan, serta permasalahan dan topik telaah lebih beragam dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya adanya beberapa hal yang belum memiliki pengaturan khusus seiring dengan kebutuhan Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan kerja sama dengan mitra terutama mitra asing dianggap memerlukan konsolidasi dengan pihak-pihak yang berkaitan sebagai contoh dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk mendapatkan pandangan secara lebih spesifik terkait masalah tersebut.

- c. Bantuan hukum dalam bidang litigasi. Di tahun 2022, tercatat Biro Hukum memberikan 4 (tiga) kali pendampingan hukum, termasuk 3 (dua) kali bantuan hukum di bidang litigasi, yaitu:
- Data tuntutan hukum penanganan pengungsi kerusuhan Maluku
 - Permintaan Keterangan Saksi Bappenas oleh Kepolisian Resor Labuhan Batu
 - Pendampingan Uji Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

- Pendampingan Permintaan Data/Dokumen dan Keterangan Saksi dalam Pengadaan BMN Meubelair dan Laptop di Kementerian PPN/Bappenas

Pada tahun 2021, tercatat Biro Hukum memberikan 6 (enam) kali pendampingan hukum, termasuk 1 (satu) kali bantuan hukum di bidang litigasi. Di tahun 2022, terdapat peningkatan bantuan hukum di bidang litigasi menjadi 3 (tiga) kali. Bantuan hukum di bidang litigasi meliputi pendampingan saksi dalam permintaan keterangan dalam dugaan tindak pidana korupsi, serta pendampingan Uji Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di Mahkamah Konstitusi.

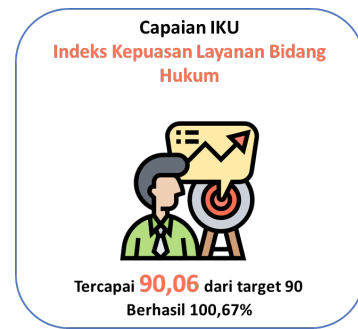
Secara umum, pendampingan hukum di bidang litigasi berjalan cukup lancar, serta keluaran pendampingan yang sesuai dengan harapan. Pendampingan yang dilakukan terhadap saksi berdampak positif dengan tidak adanya saksi yang dinaikkan statusnya menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, dalam pendampingan uji formil, permohonan pada perkara Nomor 25/PUU-XX/2022 dan 34/PUU-XX/2022 ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Konstitusi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak Pemerintah.

Adapun kendala yang terjadi selama pelaksanaan bantuan hukum di bidang litigasi adalah kurangnya personil yang dapat melakukan pendampingan insidental serta proses persidangan di Mahkamah Konstitusi yang memakan waktu cukup panjang mulai dari permohonan masuk hingga putusan.

Kedepannya, diharapkan koordinasi antara unit kerja dan Biro Hukum dapat berjalan lebih baik lagi agar penugasan personil dalam bantuan hukum litigasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Peningkatan koordinasi dan personil di atas dapat memberikan dampak positif bagi Kementerian PPN/Bappenas, khususnya bagi Biro Hukum dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan bantuan hukum yang maksimal.

C. IKSK - 3: Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ke-3 yakni "Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum" Tahun 2022 telah berhasil tercapai 100%. Hal ini didapat dari perhitungan hasil Survei Layanan Hukum Tahun 2022 yang telah dilaksanakan di bulan Oktober 2022 di



lingkup internal Kementerian PPN/Bappenas dengan pengisian kuesioner.

Dari beberapa pertanyaan dalam kuesioner dibagi dalam 3 kategori kegiatan yang dilakukan oleh Biro Hukum, sebagai berikut:

1) Kepuasan Layanan di Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Hasil dari pertanyaan kunci yang menilai kepuasan layanan di bagian ini, dimana 25 responden menjawab sangat puas, 66 responden menjawab puas, 6 responden menjawab kurang puas, dan tidak ada responden yang menjawab tidak puas. Dari penilaian layanan ini, mayoritas responden menjawab puas.

2) Kepuasan Layanan di Fasilitasi Bantuan Hukum

Hasil dari Pertanyaan kunci untuk penilaian kepuasan fasilitasi Bantuan Hukum. 35 responden menjawab sangat baik, 60 responden menjawab baik dan 2 responden menjawab kurang baik. Dari penilaian layanan ini, mayoritas responden menjawab baik.

Pertanyaan kunci selanjutnya terkait respon biro hukum dalam menanggapi permohonan bantuan pelayanan hukum yang diajukan oleh unit kerja. 38 menjawab sangat baik, 56 menjawab baik, 2 menjawab kurang dan 1 menjawab sangat kurang.

Pertanyaan kunci selanjutnya terkait kepuasan pelayanan bantuan hukum. 23 responden menjawab sangat puas, 71 responden menjawab puas, dan 3 responden menjawab kurang puas.

3) Kepuasan Layanan di Fasilitasi Pengembangan dan Informasi Hukum

Hasil Pertanyaan kunci untuk penilaian layanan pengembangan dan informasi hukum terkait dengan tampilan website. 7 responden menjawab

sangat menarik, 63 responden menjawab menarik, 17 responden menjawab kurang menarik dan 2 responden merespon tidak menarik.

Pertanyaan Kunci	A	B	C	D	Nilai Konversi
1	25	66	6	-	3,09
2	35	60	2	-	3,34
3	38	56	2	1	3,35
4	23	71	3	0	3,20
5	7	71	17	2	2,85
Total	128	324	30	3	
Rata rata	25,6	64,8	6	0,6	3,16

Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Pertanyaan Kunci dengan Nilai Konversi

Dari hasil penghitungan dapat diketahui responden yang sangat puas sebanyak 26,39%. Responden yang menilai puas sebanyak 66,80%, responden yang merasa kurang puas dengan layanan biro hukum sebanyak 6, 18% dan responden yang sama sekali tidak puas dengan pelayanan biro hukum sebanyak 0,6%.

Adapun hasil analisis perhitungan:

Survey kepuasan layanan Biro Hukum sebesar $(3,09 + 3,34 + 3,35 + 3,20 + 2,85)$
dirata-rata = Survei Kepuasan Pelayanan Biro Hukum 3,16

Sehingga nilai konversi adalah:

= survey kepuasan pelayanan biro hukum x 28,50

= 3,16 x 28,20

= **90,06**

Mutu Pelayanan = B

Kinerja Unit Pelayanan = Baik

Sehingga nilai yang didapat telah memenuhi target sesuai IKU.

Hasil kuesioner tersebut tidak mutlak mencerminkan kesimpulan secara objektif. Namun hasil dari kuesioner ini menjadi bahan introspeksi diri untuk Biro Hukum. Walaupun sudah terpenuhi target capaian IKU kepuasan layanan, Biro Hukum terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021

Perbandingan capaian realisasi IKU di dalam Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2021 dan 2022 dilakukan untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja tahun 2022 terhadap tahun 2021. Hal ini akan menjadi pembelajaran Biro Hukum untuk terus berupaya meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang. Berikut perkembangan realisasi capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

No.	Indikator Kinerja	2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	% penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum	94%	100%	100%	100%
2	% pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum	94%	100%	100%	100%
3	Indeks kepuasan layanan bidang hukum	-	-	90	90,06

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja Biro Hukum tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2021. Walaupun kondisi saat ini yang masih dalam transisi pandemi COVID 19 yang menjadikan beberapa proses belum dapat berjalan dengan normal dan menjadi salah satu hambatan dalam mencapai target kinerja, tidak berpengaruh negatif terhadap upaya pencapaian kinerja Biro Hukum. Faktor keberhasilan mempertahankan konsistensi untuk mencapai kinerja yang lebih baik didukung oleh komitmen pimpinan dan tersedianya fasilitas penunjang kerja dengan baik meskipun kekuatan SDM tidak sebanding dengan beban kerja.

Untuk indikator kinerja “Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum”, merupakan indikator yang baru ditambahkan di tahun 2022, sehingga di tahun 2021 belum ada target maupun nilai capaian kerjanya. Namun, Biro Hukum di tahun 2021 telah melakukan Survei Layanan Hukum dengan hasil “Baik”.

Capaian kinerja Biro Hukum jika dilihat dari pencapaian kinerja Renstra Biro Hukum yang tertuang di dalam Renstra Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2020-2024 akan tampak sebagai berikut tabel 3.8.

No.	Indikator Kinerja	2021		2022	
		Target Renstra	Realisasi PK	Target Renstra	Realisasi PK
1	% penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum	100%	100%	100%	100%
2	% pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%
3	Indeks kepuasan layanan bidang hukum	-	-	90	90,06

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Biro Hukum dengan Renstra Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2021 dan 2022

Secara keseluruhan capaian kinerja Biro Hukum juga telah berhasil mencapai target di Renstra Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2020-2024. Dengan capaian kinerja tersebut, Biro Hukum tahun berikutnya berupaya akan akan lebih meningkatkan kinerja dengan kegiatan yang lebih inovatif dan mendorong peningkatan kinerja yang lebih baik lagi.

3.1.3. Capaian Kinerja Lainnya

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, bertujuan untuk pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan perguruan tinggi, sehingga perlu upaya untuk mengintegrasikan data dan informasi hukum antara Pusat JDIHN dengan Anggota JDIHN. JDIH di Kementerian PPN/Bappenas dikelola oleh Biro Hukum. Biro Hukum dalam pengelolaan JDIH ini selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina JDIH Pusat yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh Menteri Hukum dan HAM cq Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Setiap tahun, dilakukan pemberian penghargaan untuk pengelola JDIH terbaik oleh BPHN. Di tahun 2022, pada pertemuan Nasional Pengelola JDIH yang pada tanggal 18 Oktober 2022, Kementerian PPN/Bappenas memperoleh penghargaan terbaik V untuk tingkat Kementerian/Instansi Pusat.

3.1.4. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pada tahun 2022 dari anggaran sebesar 4.660.949.000 telah dipergunakan sebesar 4.653.522.780 dengan persentase penyerapan sebesar 99,8 %, dengan rincian penyerapan sebagaimana dalam tabel berikut:

Kegiatan	Pagu Setelah Blokir	Penyerapan Sampai Desember	Sisa Anggaran	%
Kegiatan Penguatan Kapasitas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas	1.536.000.000	1.532.926.705	3.703.295	99.8
Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi dan Jejaring Hukum untuk Peningkatan Kepatuhan Terhadap Regulasi	1.248.000.000	1.247.255.323	744.677	99.9
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pemberian Pendampingan, Pertimbangan dan Bantuan Hukum	1.440.000.000	1.437.476.870	2.523.130	99.8
TOTAL	4.224.000.000	4.217.658.898	6.341.102	99.8
Penambahan	436.949.000	434.493.862	2.455.138	99.4
TOTAL	4.660.949.000	4.652.152.760	8.796.240	99.8

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2022

berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dapat tercapai penyerapan anggaran sebesar 99,8 %. Keberhasilan penyerapan ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan untuk melaksanakan percepatan kegiatan dan berjalan secara akuntabel. di Tahun 2022, Biro Hukum mendapatkan penambahan anggaran sebesar 435.493.862 Juta. Penambahan ini terkait dengan kebutuhan untuk koordinasi dikarenakan terdapat *judicial review* terhadap UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selain itu penambahan juga diperuntukan untuk menambah 1 (satu) tenaga PPNPN untuk kebutuhan koordinasi terkait *judicial review*.

3.1.5. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2022

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2022 dengan 2021 disajikan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar perkembangan penyerapan anggarannya. Data perbandingan ini hanya menampilkan pagu anggaran dan realisasinya yang berhubungan langsung dan berpengaruh terhadap capaian kinerja Biro Hukum yang dilaksanakan oleh masing masing koordinator. Berikut perbandingan realisasi kegiatan Biro Hukum tahun 2022 terlihat pada tabel 3.10

Kegiatan	Pagu		Realisasi Penyerapan		%	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Peraturan Perundang-Undangan	980.337.000	1.536.000.000	979.462.081	1.532.926.705	99,91	99,8
Kegiatan Pengembangan dan Informasi Hukum	797.941.000	1.248.000.000	797.366.047	1.247.255.323	99,93	99,9
Kegiatan Bantuan Hukum	1.183.712.336	1.440.000.000	1.183.703.944	1.437.476.870	100	99,8
Penambahan	-	436.494.000	-	434.493.8622		99,4
TOTAL	2.962.030.336	4.660.949.000	2.960.532.092	4.652.152.760	99,95	99,8

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kegiatan Biro Hukum Tahun 2022

3.1.6. Analisis Efisiensi Anggaran

Analisis efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi realisasi anggaran untuk tercapainya seluruh kinerja dapat dilihat pada tabel 3.11.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Kinerja 2022			Anggaran 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp. Juta)	Realisasi (Rp. Juta)	Realisasi
Layanan Hukum	% Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum	100%	100%	100%	1.536	1.532	99,8 %

Layanan Bantuan Hukum	% pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum	100%	100%	100%	1.440	1.437	99,8 %
Layanan Hukum dan Bantuan Hukum	Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum	90 (baik)	90,06 (baik)	100,67%	1.248	1.247	99,9 %
Rata Rata Capaian Kinerja		100%	100%	100,22%	4.224	4.217	99,8 %
Tingkat Efisiensi %		Capaian Kinerja		100,22%	Penyerapan Anggaran		99,8 %
		0,42%					

Tabel 3.11 Analisis Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Biro Hukum Tahun 2022

Keterangan:

Capaian Kinerja: Realisasi indikator/target x 100%

Penyerapan anggaran: realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung indikator

Tingkat efisiensi: capaian kinerja - penyerapan anggaran

Berdasarkan data tabel 3.11 menunjukkan bahwa nilai efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja di Biro Hukum sebesar 0,42%. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan persentase capaian kinerja dengan persentase realisasi/penyerapan anggaran. Untuk tahun 2022, walaupun efisiensi sebesar 0,42 persen namun semua indikator dapat tercapai sesuai target.

3.1.7. Evaluasi Internal

Evaluasi internal bertujuan untuk upaya penerapan manajemen risiko terhadap capaian kinerja Biro Hukum dan ketercapaian kinerja lingkup Kementerian PPN/Bappenas. Wujud dari evaluasi internal dalam Biro Hukum adalah penyelenggaraan koordinasi rutin di masing masing koordinator guna melaksanakan dan mengendalikan rencana kerja tahun 2022. Selain itu koordinasi juga dilakukan antar koordinator untuk membahas rencana kerja yang lintas koordinasi. Biro Hukum juga melakukan pertemuan pembahasan dengan unit kerja

di Kementerian PPN/Bappenas untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian target kinerja biro hukum, antara lain:

- Layanan peraturan perundang-undangan: (1) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan penyusunan peraturan dan kebijakan baik yang berlaku internal maupun eksternal (2) melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya dalam proses pembahasan regulasi baik yang merupakan prakarsa Kementerian PPN/Bappenas maupun yang terkait dengan Bappenas
- Layanan Bantuan Hukum: (1) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan pengusulan MOU, NKB, dan perjanjian lainnya (2) melakukan pemantauan terhadap masa berlaku MOU, NKB dan perjanjian.
- Layanan Data dan Informasi: (1) melakukan koordinasi terkait data dan informasi yang akan diunggah dalam jdih dan dalam media sosial (2) melakukan database terhadap data dan informasi hukum di Kementerian PPN/Bappenas

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam Renstra Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Biro Hukum fokus dalam upaya pencapaian 2 Sasaran Kegiatan dengan total 3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Secara keseluruhan, 3 IKU tersebut berhasil mencapai kinerja 100% sesuai target, bahkan terdapat 1 IKU melampaui target kinerja yaitu lebih dari 100% sebagaimana dalam pada Renstra Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas. Rekap capaian kinerja Biro Hukum Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp Juta)	REALISASI (Rp Juta)	REALISASI
Layanan Hukum	% Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum	100%	100%	100%	1.536	1.532	99,8%
Layanan Bantuan Hukum	% pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum	100%	100%	100%	1.440	1.437	99,8%
Layanan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum	Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum	90 (baik)	90,06 (baik)	100,67%	1.248	1.247	99,9%
Rata-rata Capaian Kinerja		90 – 100%	96,87%	100,22%	4.224	4.216	99,83%

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Biro Hukum Tahun 2022

Data pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa terdapat 2 IKU yang memenuhi target 100 %. IKU tersebut adalah IKU “Persentase Penyelesaian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum” dan “Persentase Pelayanan terhadap Permintaan Pendampingan dan Bantuan Hukum”. Upaya strategi peningkatan kinerja pelayanan ini kedepannya adalah dengan meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan stakeholder baik internal maupun eksternal Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu juga dengan menciptakan inovasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, serta pelayanan terhadap permintaan pendampingan dan bantuan hukum, sehingga kinerja dapat terus meningkat kedepannya. Sedangkan untuk IKU “Indeks Kepuasan Layanan Bidang Hukum” juga tetap diupayakan peningkatan dengan lebih responsif dan inovatif dalam mewujudkan prinsip pelayanan prima. Capaian keseluruhan kinerja Biro Hukum tahun 2022 tersebut didukung penggunaan dana sebesar Rp4.652.152.760,- atau 99.8% dari anggaran sebesar Rp4.660.949.000,-.

Telah tercapainya target capaian kinerja IKU tersebut, tidak membuat kinerja Biro Hukum puas. Namun dengan tercapainya target yang sudah ditetapkan diharapkan tetap membuat Biro Hukum terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan hukum untuk seluruh Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

Diharapkan Laporan Kinerja Biro Hukum Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang komprehensif serta transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Biro Hukum, sehingga memberikan dampak positif dalam mendukung keberhasilan Kementerian PPN/Bappenas.

4.2. Tindak Lanjut

Pada tahun 2022, Biro Hukum harus lebih adaptif dalam menghadapi segala tantangan yang mungkin timbul, salah satunya potensi *refocusing* dan keterbatasan anggaran. Biro Hukum harus tetap mengedepankan pencapaian kinerja dan pencapaian hasil pelayanan yang prima dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang efektif, efisien, dan berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memastikan pencapaian seluruh target indikator kinerja sasaran kegiatan Biro Hukum tahun 2023 agar jauh lebih tinggi dari kinerja tahun 2022, maka diperlukan strategi-strategi diantaranya sebagai berikut.

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dan efektif dengan Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas serta dengan Kementerian/Lembaga lainnya baik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan maupun dalam pendampingan dan bantuan hukum;
2. Melakukan pemantauan terhadap MoU, NKB, dan perjanjian yang telah ditandatangani;
3. Meningkatkan koordinasi terkait data dan informasi yang akan diunggah dalam JDIH dan dalam media sosial;
4. Melakukan pembenahan database dan informasi hukum di Kementerian PPN/Bappenas;
5. Menyusun perencanaan yang disertai dengan monitoring secara berkala terhadap perencanaan kegiatan yang telah disusun agar rencana kerja dapat diselesaikan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan; dan
6. Melakukan pengembangan kompetensi untuk staf PNS maupun PPNN baik secara mandiri maupun oleh Biro Sumber Daya Manusia.